

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I



TIM PENYUSUN

Pengarah :

Fajar Kurniawan

Penyusun :

Ambar Retnowulan

Muhandis Sidqi

Dani Dasa Permana

Ani Kusumaningrum

Danar Linsa Setiawati

Naufal Sanca Lovandhika

Kontributor :

Tim Teknis Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

KATA PENGANTAR

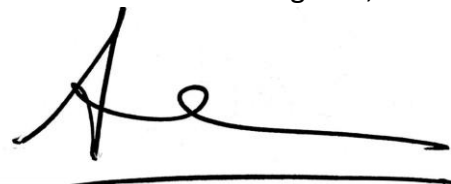
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan rida-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2026 Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2026 Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2026 disusun sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2026 Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2026 berupaya memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target khususnya pada tahun 2026, memberikan penjelasan mengenai hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, serta rencana aksi pada periode berikutnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2026 Direktorat Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2026 ini, serta berharap Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2026 Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2026 menjadi salah satu pertimbangan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka melakukan perbaikan dan pengembangan perencanaan ruang laut.

Apabila masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan, kami mohon maaf dan masukan yang membangun demi perbaikan pada periode berikutnya.

Jakarta, 20 April 2026
Direktorat Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Laut,



Fajar Kurniawan
NIP. 197608042003121003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL) Tahun 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja dalam mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (<http://www.kinerjaku.kkp.go.id>) dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian pada masing-masing indikator kinerja utama. Pada periode pelaporan ini, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut memiliki dua indikator kinerja utama yang mendukung dua sasaran kegiatan, yaitu: Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, dan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat PPRL.

Berdasarkan hasil pengukuran, Direktorat PPRL memperoleh Nilai Capaian Kinerja sebesar 112, yang termasuk dalam kategori "*Istimewa*". Pada Triwulan I Tahun 2026 terdapat 2 Indikator Kinerja yang dilaporkan yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang telah tercapai 100% dari target Triwulan I yaitu sebesar 81% dan Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang telah tercapai 100% untuk target Triwulan I yaitu sebanyak 1 Dokumen, serta telah tercapai 25% dari target tahunan.

Anggaran kegiatan pendukung kinerja di Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran sebesar Rp. 9.508.597.000,- dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) dengan pagu efektif (RM) sebesar Rp. 3.485.498.000,-. Berdasarkan aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp. 591.290.941,- atau 6,21 % dari total pagu anggaran yang termasuk blokir dan 16,96 % dari pagu anggaran efektif.

Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program/kegiatan Triwulan I Tahun 2026 terdapat kendala dalam pelaksanaan kinerja yaitu 1). Blokir anggaran dan, 2).Kurangnya sumber daya manusia untuk kebutuhan masing-masing tim kerja untuk mencapai target yang telah ditentukan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	8
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Maksud dan Tujuan	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
2.1 Visi, Misi KKP dan Agenda Pembangunan Nasional	15
2.2 Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029.....	16
2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2026.....	19
2.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2026.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2 Akuntabilitas Keuangan	39
BAB IV PENUTUP	41
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Rekomendasi.....	41
4.3 Tindak Lanjut.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.....	11
Tabel 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) KKP Tahun 2025–2029	16
Tabel 3 Indikator Kinerja (IK) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2026	18
Tabel 4 Indikator Kinerja Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut pada tahun 2026	20
Tabel 5 Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut (%) pada Triwulan I Tahun 2026 IK 1	22
Tabel 6 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025 IK 1	22
Tabel 7 Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun Berjalan IK 1	22
Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi (%) pada Triwulan I Tahun 2026 IK 2	24
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025 IK 2	24
Tabel 10 Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target tahun Berjalan IK 2	24
Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL (%) pada Triwulan I Tahun 2026 IK 3	25
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025 IK 3	25
Tabel 13 Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun Berjalan IK 3	25
Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja (IK) Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi) pada Triwulan I Tahun 2026 IK 4	26
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025 IK 4	27
Tabel 16 Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun Berjalan IK 4	27
Tabel 17 Capaian Indikator Kinerja (IK) Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNNP(Lokasi) IK 5	28
Tabel 18 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025 IK 5	28
Tabel 19 Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun Berjalan IK 5	28
Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%) pada Triwulan I Tahun 2026 IK 6	29
Tabel 21 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025 IK 6	30
Tabel 22 Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target tahunan Berjalan IK 6	30
Tabel 23 Target dan Realisasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut TW I Tahun 2026 IK 7	31
Tabel 24 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025 IK 7	31
Tabel 25 Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun Berjalan IK 7	31
Tabel 26 Kategori nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.....	32
Tabel 27 Target dan Realisasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut TW I Tahun 2026 IK 8	32
Tabel 28 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025 IK 8	33
Tabel 29 Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun Berjalan IK 8	33
Tabel 30 Target dan Realisasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut TW I Tahun 2026 IK 9	34
Tabel 31 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025 IK 9	34
Tabel 32 Perbandingan Realisasi Kinerja TW Berjalan dengan Target Tahun Berjalan IK 9	34
Tabel 33 Target dan Realisasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut TW I Tahun 2026 IK 10	36
Tabel 34 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025 IK 10	36
Tabel 35 Perbandingan Realisasi Kinerja TW Berjalan dengan Target Tahun Berjalan IK 10	36
Tabel 36 Kategori nilai dalam pengawasan keasipan internal	38
Tabel 37 Target dan Realisasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut TW I Tahun 2026 IK 11	38
Tabel 38 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025 IK 11	38

Tabel 39 Perbandingan Realisasi Kinerja TW Berjalan dengan Target Tahun Berjalan IK 11	38
Tabel 40 Akuntabilitas Keuangan TW I Tahun 2026.....	39
Tabel 41 Tindak Lanjut Rekomendasi.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Bisnis Direktorat Pengendalian pemanfaatan Ruang Laut	11
Gambar 2 Capaian Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 pada Aplikasi Kinerjaku	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan ruang laut Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah meningkatnya tekanan pembangunan dan eksploitasi sumber daya kelautan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai langkah reformasi regulasi, termasuk dalam hal penyederhanaan perizinan berusaha berbasis risiko. Dalam kerangka ini, instrumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) menjadi syarat utama bagi setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut agar selaras dengan rencana tata ruang laut nasional maupun daerah. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, yang mencakup tujuh aspek utama:

- a. Identifikasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;
- b. Laporan Tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
- c. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
- d. Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi;
- e. Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif;
- f. Pengenaan Sanksi; dan
- g. Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut.

Dalam kerangka tersebut, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL) memegang peran strategis dalam memastikan kebijakan tersebut berjalan secara efektif dan akuntabel. Direktorat ini tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengendalian administratif, tetapi juga pada aspek pengawasan implementatif di lapangan melalui berbagai kinerja utama yang menjadi prioritas. Berikut merupakan Kinerja utama Direktorat PPRL selama tahun pelaporan meliputi:

- a. Penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, sebagai bagian dari penegakan tertib pemanfaatan ruang dan perlindungan kepentingan publik;
- b. Pemantauan dan evaluasi KKPRL untuk memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan berjalan sesuai rencana dan ketentuan perundang-undangan;
- c. Penilaian laporan tahunan pelaksanaan KKPRL oleh para pemegang izin guna mendukung transparansi dan pengendalian berbasis data;
- d. Penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi (RTRL/RZWP3K) yang menjadi dasar evaluasi implementasi kebijakan ruang laut di daerah;

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktorat PPRL selama tahun pelaporan. Selain memuat capaian terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis, laporan ini juga menyajikan analisis atas tantangan, pembelajaran, dan rekomendasi untuk penguatan pengendalian pemanfaatan ruang laut ke depan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2026 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran di Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2026 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

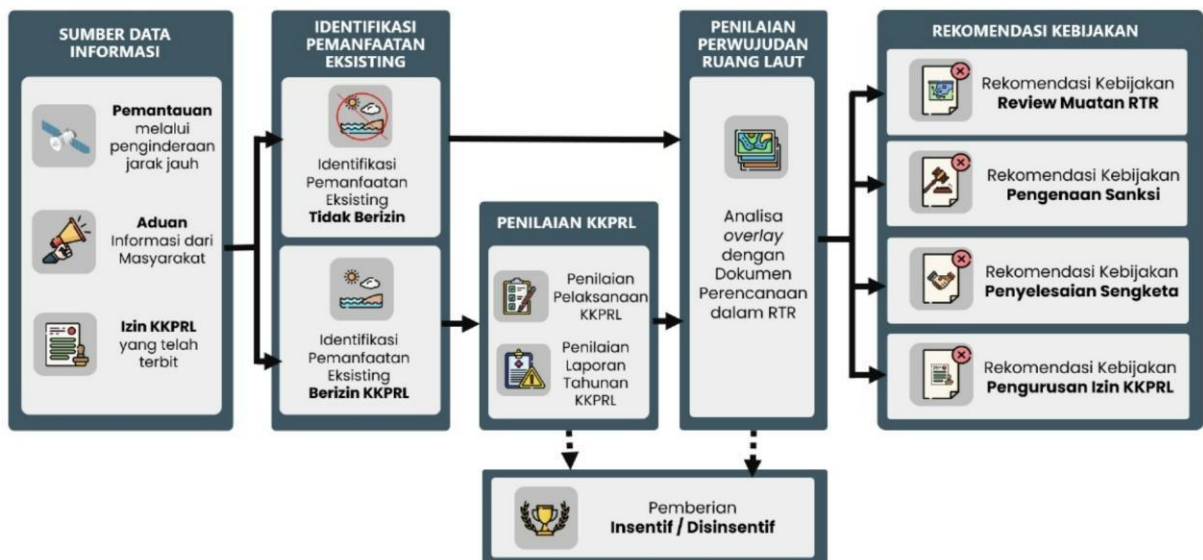
A. Penjelasan Umum dan Organisasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL) merupakan salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dibantu oleh 6 (enam) tim kerja, kelompok jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum. Tim kerja dalam Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025, sebagai berikut:

1. Sanksi dan Sengketa
2. Pengendalian KKPRL
3. Identifikasi Pemanfaatan Ruang
4. Perwujudan Ruang
5. Sarana Prasarana
6. Dukungan Manajemen

Direktorat ini memiliki tugas dan fungsi strategis dalam melaksanakan pengendalian atas kegiatan pemanfaatan ruang laut agar sesuai dengan rencana tata ruang laut yang telah ditetapkan serta prinsip keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir. Pembentukan Direktorat PPRL sejalan dengan implementasi kebijakan nasional di bidang kelautan, khususnya pasca-ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menekankan pada kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko. Dalam konteks ini, Direktorat PPRL berperan penting dalam memastikan bahwa pemanfaatan ruang laut oleh pelaku usaha maupun non-usaha telah sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan tidak menimbulkan konflik ruang atau degradasi lingkungan. Berikut merupakan fungsi utama Direktorat PPRL meliputi:

1. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan KKPRL;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut;
3. Penanganan sengketa dan pelanggaran pemanfaatan ruang laut;
4. Penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi;
5. Penyusunan kebijakan pengendalian ruang laut, termasuk kebijakan pemberian insentif dan disinsentif;
6. Koordinasi dan pembinaan teknis kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan pelaku usaha.



Gambar 1 Proses Bisnis Direktorat Pengendalian pemanfaatan Ruang Laut

B. Kepegawaian Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), berdasarkan Kepmen KP No. 86/MEN-SJ/KP.431/IV/2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

NO.	UNIT PENGAWAS	JUMLAH PELAKSANA/STAF
1	Direktur	1
2	PNS	14
3	PPPK	3
4	PPPK paruh waktu	2
JUMLAH		20

Di samping ASN dan PPPK, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dibantu oleh tenaga selain ASN (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan/PJLP) sebanyak 10 orang. Meskipun memiliki sumber daya manusia yang kompeten, jumlah pegawai yang tersedia saat ini masih belum sebanding dengan beban kerja yang tinggi dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya tuntutan tugas dan fungsi Direktorat, antara lain pengendalian pemanfaatan ruang laut di seluruh wilayah Indonesia, penanganan sengketa ruang laut, monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKPRL, serta penyusunan laporan kepatuhan dan rekomendasi kebijakan.

Keterbatasan jumlah SDM ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga efektivitas pelaksanaan tugas Direktorat, terutama dalam merespons dinamika pemanfaatan ruang laut yang terus berkembang. Oleh karena itu, upaya penguatan kelembagaan melalui penambahan formasi pegawai, optimalisasi peran jabatan fungsional, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM terus diupayakan secara berkelanjutan.

C. Aspek Strategis Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Dalam rangka mewujudkan tata kelola ruang laut yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL) memiliki sejumlah aspek strategis yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Aspek-aspek ini menjadi krusial dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional, termasuk implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan optimalisasi pemanfaatan ruang laut sebagai sumber daya pembangunan. Berikut adalah aspek strategis utama Direktorat PPRL:

7. Penerapan Kebijakan KKPRL sebagai Instrumen Perizinan Berbasis Tata Ruang Laut KKPRL merupakan instrumen utama dalam sistem perizinan berbasis risiko di sektor kelautan. Direktorat PPRL berperan penting dalam pengawasan implementasi KKPRL, termasuk memastikan kesesuaian kegiatan dengan rencana zonasi dan mendorong kepatuhan pelaku usaha maupun non-usaha.
8. Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Laut Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan KKPRL, diperlukan sistem pengawasan yang terintegrasi, transparan, dan berbasis data. Direktorat PPRL melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut, termasuk penilaian atas laporan tahunan pelaksanaan KKPRL.
9. Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran Ruang Laut Sengketa dan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang laut dapat menghambat investasi dan merusak ekosistem. Direktorat PPRL memiliki peran strategis dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa, menangani pelanggaran, serta mengkoordinasikan penegakan aturan bersama instansi terkait.
10. Penilaian ini penting untuk mengukur sejauh mana implementasi kebijakan tata ruang laut di daerah telah dilaksanakan. Hasil penilaian menjadi dasar dalam memberikan pembinaan serta perbaikan tata kelola zonasi laut.
11. Optimalisasi Lokasi Pemanfaatan Laut yang Belum Memiliki Izin dan Berpotensi Menjadi Sumber PNBPD Identifikasi dan legalisasi pemanfaatan ruang laut yang belum berizin menjadi peluang strategis dalam peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sekaligus mendorong tertib pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan pelaku usaha.
12. Perumusan Rekomendasi Kebijakan Insentif dan Disinsentif. Untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengendalian, Direktorat PPRL menyusun rekomendasi kebijakan pemberian insentif bagi pelaku usaha/pemerintah daerah yang patuh serta disinsentif bagi yang tidak patuh terhadap ketentuan pemanfaatan ruang laut.
13. Penguatan Koordinasi dan Pembinaan Teknis kepada Pemerintah Daerah Mengingat sebagian besar kewenangan pemanfaatan ruang laut berada di daerah, maka penguatan kapasitas, fasilitasi teknis, dan koordinasi menjadi kunci dalam mewujudkan pengendalian ruang laut yang efektif dan harmonis secara nasional.

Melalui aspek-aspek strategis tersebut, Direktorat PPRL terus berupaya mendorong pemanfaatan ruang laut yang legal, produktif, dan lestari demi mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang inklusif dan berkelanjutan.

E. Permasalahan Umum (*Strategic Issues*)

Dalam pelaksanaan tugas pengendalian pemanfaatan ruang laut, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL) menghadapi sejumlah permasalahan strategis yang

memerlukan perhatian dan penanganan secara sistematis dan berkelanjutan. Permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga struktural, regulatif, dan koordinatif, yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut nasional. Adapun permasalahan umum (strategic issues) yang diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

14. Masih terbatasnya kepatuhan terhadap pelaksanaan KKPRL
Banyak kegiatan pemanfaatan ruang laut, baik oleh pelaku usaha maupun non-usaha, yang belum mengantongi KKPRL atau tidak melaporkan pelaksanaan kewajibannya secara rutin, sehingga menyulitkan pengawasan dan pengendalian.
15. Tingginya jumlah pemanfaatan ruang laut yang belum berizin
Ditemukan banyak lokasi kegiatan di wilayah laut yang belum memiliki legalitas formal (KKPRL), padahal secara ekonomi berpotensi menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kurangnya pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan menjadi salah satu penyebab utama.
16. Belum optimalnya sistem pemantauan dan pelaporan KKPRL
Masih terdapat tantangan dalam integrasi data, pelaporan tahunan, dan pemantauan lapangan. Hal ini berdampak pada kesulitan dalam mengevaluasi kepatuhan serta efektivitas pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.
17. Penyelesaian sengketa ruang laut yang belum terlembaga secara optimal
Mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemanfaatan ruang laut, baik antar usaha, antara usaha dan masyarakat, maupun antar wilayah, belum memiliki sistem formal yang kuat dan responsif.
18. Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam pengendalian ruang laut
Banyak daerah belum memiliki kapasitas teknis, sumber daya manusia, maupun anggaran yang memadai untuk melaksanakan fungsi pengendalian ruang laut secara efektif, khususnya dalam menindaklanjuti pelaksanaan RZWP3K.
19. Implementasi insentif dan disinsentif belum berjalan optimal
Kebijakan pemberian insentif kepada pemanfaat ruang laut yang patuh serta disinsentif bagi yang tidak patuh masih dalam tahap pengembangan, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku pelaku usaha.
20. Koordinasi antar lembaga belum sepenuhnya sinergis
Pengendalian ruang laut melibatkan banyak kementerian/lembaga dan sektor. Lemahnya koordinasi dan belum adanya sistem pertukaran data yang terintegrasi sering kali menghambat pengambilan keputusan dan penanganan pelanggaran di lapangan.

Menghadapi berbagai permasalahan strategis ini, Direktorat PPRL terus melakukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi pengawasan, serta mendorong sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut yang legal, tertib, dan berkelanjutan.

D. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKJ) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2026

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja triwulan berjalan;
2. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja triwulan berjalan dengan triwulan tahun sebelumnya atau triwulan sebelumnya (jika ada);
3. Membandingkan membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan triwulan berjalan dengan target tahunan;
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan;
5. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Selain itu, jika terdapat perubahan anggaran dalam perkembangannya juga dijelaskan dalam laporan ini.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi, Misi KKP dan Agenda Pembangunan Nasional

Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 pada tanggal 10 Februari 2025 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai salah satu kementerian yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2025–2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya misi Presiden. Untuk pencapaian sarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha (BUMN, swasta) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Rencana pembangunan 2025–2029 membidik 3 (tiga) sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5%, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59%, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8% di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

2.2 Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029 merupakan tindaklanjut dari Pepres no. 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada lampiran atau pada tabel dibawah ini:

Tabel 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) KKP Tahun 2025–2029

Nama indicator	Target	
	2025	2029
Prioritas Nasional 2		
PP 06 - Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi		
Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP	80.00	84.00
Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	92.00	96.00
PP 10 - Swasembada Pangan		
Volume Produksi Ikan Budi Daya (Juta Ton)	6,75	8,52
Volume Produksi Perikanan Tangkap (Juta Ton)	6,19	7,50
Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kap/tahun)	26,26	28,63
Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standard mutu dan keamanan (%)	70.00	80.00
Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang terfasilitasi	4	27
PP 16 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik		
Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	50	58
Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (%)	9,23	10
Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITES	68,30	70,94
PP 18 - Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir		
Volume penanggulangan sampah dari aktivitas Masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif)	18	1244
PP 22 - Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru		
Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir	13,6	100
Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Indeks)	82	86
Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	0,49	0,61

Nama indicator	Target	
	2025	2029
Prioritas Nasional 2		
PP 22 - Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru		
Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang berada pada batas biologis yang aman (%)	≤ 80	≤ 80
Luas Kawasan Konservasi Perairan yang Efektif Dikelola (kumulatif)	18,5	21,10
Luas Kawasan Konservasi di Perairan wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (Juta Ha)	30	32,5
Pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK) (%)	4,00-6,00	6,00-7,00
Volume Produksi Ikan (Juta Ton)	12,94	16,02
Volume Produksi Olahan Perikanan (Juta Ton)	3,71	4,37
PDB Perikanan (Triliun Rupiah)	595,06	718,98
Volume Produksi Garam (Juta Ton)	2,25	3
Produktivitas Lahan Garam Rakyat (Ton/Ha)	83	93
Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (%)	75	79
Prioritas Nasional 5		
PP 01 - Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor		
Volume Produksi Rumput Laut (juta ton)	11,64	14,14
PP 05 - Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global		
Nilai Ekspor Hasil Perikanan (miliar USD)	6,25	8,50
Nilai Ekspor Rumput Laut (juta USD)	574,00	898,00
Proporsi Ekspor Produk Olahan Rumput Laut (%)	46,5	61,3
Prioritas Nasional 8		
PP 03 - Pembangunan Berketahanan Iklim		
Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	55	76

Nama indikator	Target	
	2025	2029
Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang direhabilitasi	55	76

Pada tabel di atas **Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir** merupakan indikator yang menjadi tanggung jawab Ditjen Penataan Ruang Laut yang sebelumnya Dit. Penataan Ruang Laut. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut mempunyai 11 indikator kinerja (Indikator Kinerja Utama/IKU dan Indikator Kinerja/IK) pada tahun 2026. Rincian perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Indikator Kinerja (IK) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	PERIODE PELAPORAN
1	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	1.	Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100	Tahunan
		2.	Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi (%)	60	Tahunan
		3.	Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL (%)	100	Tahunan
		4.	Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi)	12	Tahunan
		5.	Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki Izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBPN (Lokasi)	17	Tahunan
		6.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)	60	Tahunan
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)	81	Triwulan
		8.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat	70	Tahunan

			Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)		
		9.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen)	4	Triwulan
		10.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)	81	Semesteran
		11.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)	75	Tahunan

2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2026

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja (PK) adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
2. Dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2026. Sasaran kegiatan, indikator, dan target tahun 2026 terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2026.

2.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2026

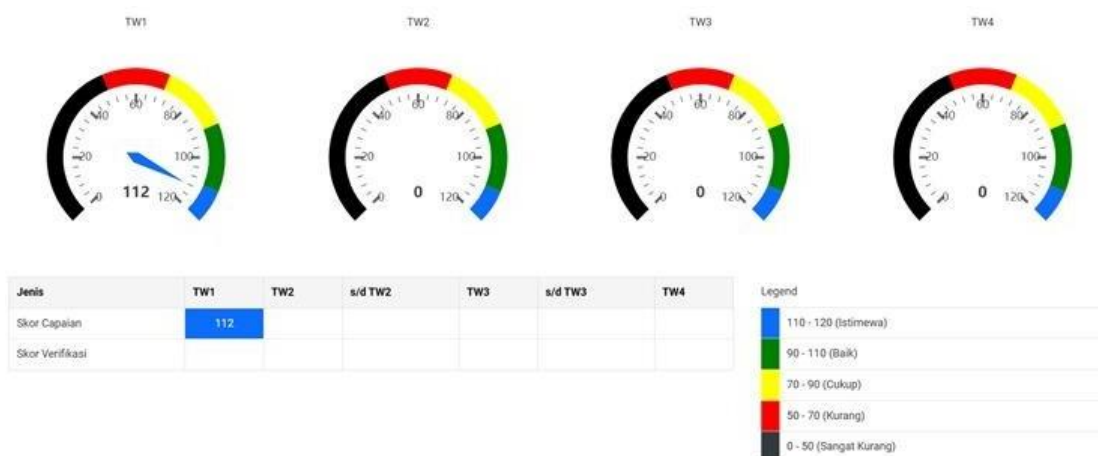
Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dilakukan dengan berpedoman pada formula atau rumus atau teknik penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU dan Perjanjian Kinerja tahun 2026. Nilai capaian kinerja dihitung secara berkala (triwulanan, semesteran, dan tahunan) dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dimasukkan ke dalam sistem aplikasi kinerja berbasis informasi teknologi (<http://kinerjaku.kkp.go.id>) yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang ditandatangani pada tanggal 3 Februari 2026, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut mempunyai 11 indikator kinerja terdiri dari 6 Indikator Kinerja mendukung kegiatan teknis dan 5 indikator mendukung kegiatan manajemen. Secara umum, Indikator Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2026 Triwulan I Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut berdasarkan aplikasi *online* <http://kinerjaku.kkp.go.id> adalah 112 dan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2 Capaian Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 pada Aplikasi Kinerjaku

Indikator Kinerja Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut pada tahun 2026 difokuskan pada 2 (dua) Indikator Kinerja (IK) sebagai berikut:

Tabel 4 Indikator Kinerja Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut pada tahun 2026

NO.	NAMA INDIKATOR	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET
IK 1.	Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut (%)	20	Dokumen
IK 2.	Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi (%)	100	Dokumen
IK 3.	Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL (%)	1000	Laporan
IK 4.	Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi)	12	Lokasi
IK 5.	Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki Izin dan Berpotensi menjadi	17	Lokasi

	Sumber PNB (Lokasi)		
IK 6.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)	60%	Persentase
IK 7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)	4	Laporan
IK 8.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)	1	Laporan
IK 9.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen)	4	Laporan
IK 10.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)	2	Laporan
IK 11.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)	1	Laporan

IK 1. Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut (%)

Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut (%) adalah pengukuran proporsi sengketa pemanfaatan ruang laut yang telah ditangani oleh instansi berwenang, terhadap laporan aduan sengketa pada periode tertentu. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses non litigasi dan litigasi, Proses non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan yang dilakukan melalui musyawarah, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan Proses litigasi merupakan mekanisme penyelesaian 5 sengketa melalui lembaga peradilan (pengadilan) sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yang menghasilkan putusan hakim yang bersifat mengikat para pihak.

Proses penyelesaian sengketa melalui non litigasi dapat berasal dari laporan aduan masyarakat, badan hukum, dan/atau instansi pemerintah, serta hasil identifikasi pemanfaatan ruang laut, penilaian pelaksanaan KKPRL dan/atau penilaian perwujudan RZ/RTR yang dituangkan dalam Berita Acara/Nota Dinas Direktur. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dibuktikan dengan laporan pada keterlibatan dalam proses di lembaga peradilan (pengadilan) dan/atau putusan hakim. Dalam hal pada proses penyelesaian sengketa terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut, maka akan dilakukan tindak lanjut berupa penyampaian rekomendasi sanksi kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP). Formula perhitungan yang digunakan dalam menentukan persentase penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut sebagai berikut:

$$S (\%) = \frac{a + b + c}{d} \times 100\%$$

Keterangan :

- S : Persentase penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut
- a : Jumlah laporan aduan sengketa pemanfaatan ruang laut, hasil identifikasi pemanfaatan ruang laut, penilaian pelaksanaan KKPRL dan/atau penilaian perwujudan RZ/RTR yang diproses
- b : Jumlah keterlibatan proses penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut pada lembaga peradilan (pengadilan) dan/atau putusan hakim yang dilaporkan
- c : Jumlah rekomendasi sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang disampaikan kepada Ditjen PSDKP
- d : Jumlah laporan aduan sengketa yang diterima dan keterlibatan pada proses litigasi serta indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang ditemukan

A. Capaian Indikator Triwulan I 2026

Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut (%) pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat ditentukan karena pelaporan dilakukan secara berkala dalam siklus tahunan. Target Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut pada Tahun 2026 sebesar 100%.

Tabel 5 Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut (%) pada Triwulan I Tahun 2026 IK 1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
1.	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut	1.	Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100	-

B. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025

Tabel 6 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025 IK 1

SP - 1	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut					
IKU - 01	Persentase penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut (%)					
Realisasi TW I Tahun 2026	Tahun 2026				PK	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya	Target PK 2026	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-

C. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 7 Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun Berjalan IK 1

INDIKATOR	CAPAIAN (%)	
	TW I	s.d TW IV
Persentase penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut (%)	-	100

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Analisis terhadap tingkat keberhasilan maupun kegagalan kegiatan pada tahap ini belum dapat dilakukan secara komprehensif, mengingat pelaksanaan kegiatan masih berlangsung dan proses penyampaian pelaporan dilakukan secara berkala dalam siklus tahunan. Dengan demikian, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta efektivitas solusi atau tindak lanjut

yang diterapkan masih memerlukan proses pemantauan dan evaluasi lebih lanjut hingga seluruh rangkaian kegiatan dan tahapan pelaporan selesai dilaksanakan.

E. Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Kegiatan pendukung ini masih dalam proses pelaksanaan dan merupakan bagian dari kegiatan yang bersifat berkelanjutan dengan mekanisme penyampaian pelaporan secara tahunan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan masih terus dilakukan melalui koordinasi, monitoring, pengumpulan data, serta penyusunan dan pengelolaan dokumen pendukung guna memastikan seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan

F. Rencana Aksi

Rencana aksi dilakukan melalui monitoring berkala, koordinasi pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data dukung, serta evaluasi capaian guna memastikan target tahunan dapat tercapai pada akhir periode pelaporan

IK 2. Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi (%)

Penilaian pelaksanaan KKPRL dilaksanakan untuk memastikan Kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL; dan Pemenuhan prosedur perolehan KKPRL. Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPRL dilakukan terhadap lokasi sampel/proritas KKPRL yang terbit meliputi:

- a. Persetujuan KKPRL; dan
- b. Konfirmasi KKPRL.

Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL dilakukan untuk menilai tingkat ketaatan pemegang KKPRL terhadap dokumen KKPRL dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Waktu penyelenggaraan kegiatan penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL dilakukan:

- a. Selama kegiatan berusaha atau nonberusaha/pembangunan berjalan; dan/atau
- b. Setelah kegiatan berusaha atau nonberusaha/pasca Pembangunan; dan
- c. Tindak Lanjut Pelaku usaha setelah dilakukan penilaian pelaksanaan

Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPRL meliputi realisasi dari pernyataan komitmen dalam menjaga ekosistem dan melakukan rehabilitasi ekosistem sebelum dilakukan pemanfaatan ruang laut, terutama ekosistem mangrove, terumbu karang dan lamun. Berikut merupakan formula perhitungan yang digunakan dalam menentukan Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi (%) adalah sebagai berikut:

$$L = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan :

- L : Persentase KKPRL yang dipantau dan dievaluasi
a : Jumlah subjek hukum yang dilakukan penilaian pelaksanaan KKPRL
b : Jumlah rencana aksi subjek hukum penilaian pelaksanaan KKPRL

A. Capaian Indikator Triwulan I 2026

Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi (%) pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi (%) pada Triwulan I Tahun 2026 IK 2

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
1.	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut	2.	Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi (%)	60	-

B. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025 IK 2

SP - 1		Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut				
IKU - 02		Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi (%)				
Realisasi TW I Tahun 2026	Tahun 2026				PK	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya	Target PK 2026	% Capaian
-	-	-	-	-	60	-

C. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target tahun Berjalan

Tabel 10 Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target tahun Berjalan IK 2

INDIKATOR	CAPAIAN (%)	
	TW I	s.d TW IV
Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi (%)	-	60

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi.

Analisis terhadap tingkat keberhasilan maupun kegagalan kegiatan pada tahap ini belum dapat dilakukan secara komprehensif, mengingat pelaksanaan kegiatan masih berlangsung dan proses penyampaian pelaporan dilakukan secara berkala dalam siklus tahunan. Dengan demikian, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta efektivitas solusi atau tindak lanjut yang diterapkan masih memerlukan proses pemantauan dan evaluasi lebih lanjut hingga seluruh rangkaian kegiatan dan tahapan pelaporan selesai dilaksanakan.

E. Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.

Kegiatan pendukung ini masih dalam proses pelaksanaan dan merupakan bagian dari kegiatan yang bersifat berkelanjutan dengan mekanisme penyampaian pelaporan secara tahunan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan masih terus dilakukan melalui koordinasi, monitoring, pengumpulan data, serta penyusunan dan pengelolaan dokumen pendukung guna memastikan seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan

F. Rencana Aksi

Rencana aksi dilakukan melalui monitoring berkala, koordinasi pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data dukung, serta evaluasi capaian guna memastikan target tahunan dapat tercapai pada akhir periode pelaporan

IK 3. Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL (%)

Laporan tahunan KKPRL merupakan kewajiban pemegang KKPRL untuk menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri, agar Menteri dapat memperoleh data dan informasi paling sedikit mengenai:

- Kemajuan dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Perizinan Berusaha, dan/atau perizinan nonberusaha;
- Realisasi luas perairan dan pemanfaatannya dalam hal Perizinan Berusaha dan/atau perizinan nonberusaha telah diterbitkan; serta
- Pemenuhan kewajiban KKPRL.

Berikut merupakan formula perhitungan yang digunakan dalam menentukan Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL (%) adalah sebagai berikut:

$$T = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan :

- T : Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL
a : Jumlah Laporan Tahunan yang dilaporkan melalui E-Sea
b : Jumlah Izin KKPRL Terbit sampai dengan T-1 Tahun berjalan

A. Capaian Indikator Triwulan I 2026

Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL (%) pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL (%) pada Triwulan I Tahun 2026 IK 3

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
1.	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut	3.	Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL (%)	100	-

B. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025 IK 3

SP - 1		Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut				
IKU - 03		Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL (%)				
Realisasi TW I Tahun 2026	Tahun 2026				PK	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya	Target PK 2026	% Capaian
-	-	-	-	-	100	-

C. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 13 Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun Berjalan IK 3

INDIKATOR	CAPAIAN (%)	
	TW I	s.d TW IV
Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL (%)	-	100

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Analisis terhadap tingkat keberhasilan maupun kegagalan kegiatan pada tahap ini belum dapat dilakukan secara komprehensif, mengingat pelaksanaan kegiatan masih berlangsung dan proses penyampaian pelaporan dilakukan secara berkala dalam siklus tahunan. Dengan

demikian, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta efektivitas solusi atau tindak lanjut yang diterapkan masih memerlukan proses pemantauan dan evaluasi lebih lanjut hingga seluruh rangkaian kegiatan dan tahapan pelaporan selesai dilaksanakan.

E. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi

Kegiatan pendukung ini masih dalam proses pelaksanaan dan merupakan bagian dari kegiatan yang bersifat berkelanjutan dengan mekanisme penyampaian pelaporan secara tahunan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan masih terus dilakukan melalui koordinasi, monitoring, pengumpulan data, serta penyusunan dan pengelolaan dokumen pendukung guna memastikan seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan

F. Rencana Aksi

Rencana aksi dilakukan melalui monitoring berkala, koordinasi pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data dukung, serta evaluasi capaian guna memastikan target tahunan dapat tercapai pada akhir periode pelaporan

IK 4. Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi)

Penilaian Perwujudan Ruang Laut adalah proses evaluasi terhadap implementasi rencana tata ruang laut dalam suatu wilayah, baik pada skala nasional dan/atau provinsi. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana rencana tata ruang laut (RTRL atau RZ) telah diwujudkan di lapangan dan digunakan secara berkelanjutan sesuai peruntukannya. Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR)Rencana Zonasi (RZ):

- a. Penilaian perwujudan RTR/RZ dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan implementasi perwujudan ruang sesuai dengan RTR/RZ
- b. Penilaian perwujudan RTR/RZ dilakukan terhadap seluruh dokumen RTR/RZ meliputi Pola/Alokasi Ruang, struktur ruang dan Indikasi program utama RTR/RZ.
- c. Penyusunan Rekomendasi Tindak Lanjut Penilaian perwujudan RTR/RZ
Formula perhitungan yang digunakan dalam menentukan Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi) yaitu dengan cara Menginventarisasi dan menjumlahkan lokasi RTR dan/atau RZ yang dilakukan penilaian pada tahun berjalan.

A. Capaian Indikator Triwulan I 2026

Capaian Indikator Kinerja (IK) Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi) pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja (IK) Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi) pada Triwulan I Tahun 2026 IK 4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
1.	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut	4.	Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi)	12	-

B. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025 IK 4

SP - 1	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut					
IKU - 04	Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi)					
Realisasi TW I Tahun 2026	Tahun 2026				PK	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya	Target PK 2026	% Capaian
-	-	-	-	-	12	-

C. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 16 Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun Berjalan IK 4

INDIKATOR	CAPAIAN (Lokasi)	
	TW I	s.d TW IV
Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi)	-	12

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Analisis terhadap tingkat keberhasilan maupun kegagalan kegiatan pada tahap ini belum dapat dilakukan secara komprehensif, mengingat pelaksanaan kegiatan masih berlangsung dan proses penyampaian pelaporan dilakukan secara berkala dalam siklus tahunan. Dengan demikian, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta efektivitas solusi atau tindak lanjut yang diterapkan masih memerlukan proses pemantauan dan evaluasi lebih lanjut hingga seluruh rangkaian kegiatan dan tahapan pelaporan selesai dilaksanakan.

E. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi

Kegiatan pendukung ini masih dalam proses pelaksanaan dan merupakan bagian dari kegiatan yang bersifat berkelanjutan dengan mekanisme penyampaian pelaporan secara tahunan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan masih terus dilakukan melalui koordinasi, monitoring, pengumpulan data, serta penyusunan dan pengelolaan dokumen pendukung guna memastikan seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.

F. Rencana Aksi

Rencana aksi dilakukan melalui monitoring berkala, koordinasi pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data dukung, serta evaluasi capaian guna memastikan target tahunan dapat tercapai pada akhir periode pelaporan

IK 5. Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki Izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBP (Lokasi)

Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang telah dan belum memiliki izin serta berpotensi menjadi sumber PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Umumnya mencakup area atau kegiatan pemanfaatan ruang laut yang telah memiliki KKPR dan berjalan tanpa legalitas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPR). Lokasi Identifikasi mempertimbangkan prioritas sasaran sebagaimana diatur dalam Kepdirjen 77 Tahun 2023 meliputi :

- Terdapat perubahan kebijakan strategis nasional yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. Adanya laporan atau aduan masyarakat;
- c. Terdapat indikasi sengketa dan/atau konflik;
- d. Terdapat pemanfaatan ruang laut eksisting yang belum memiliki KKPRL; dan/atau
- e. Berdasarkan hasil pengendalian dan/atau pengawasan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut

Formula perhitungan yang digunakan dalam menentukan Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNB(P(Lokasi) yaitu dengan cara Menginventarisasi dan menjumlahkan lokasi yang telah diidentifikasi pemanfaatan ruang laut eksisting yang belum memiliki izin.

A. Capaian Indikator Triwulan I 2026

Capaian Indikator Kinerja (IK) Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNB(P(Lokasi) pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17 Capaian Indikator Kinerja (IK) Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNB(P(Lokasi) IK 5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
1.	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut	5.	Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNB(P(Lokasi)	17	-

B. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025 IK 5

SP - 1	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut					
IKU - 05	Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNB(P(Lokasi)					
Realisasi TW I Tahun 2026	Tahun 2026				PK	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya	Target PK 2026	% Capaian
-	-	-	-	-	17	-

C. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 19 Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun Berjalan IK 5

INDIKATOR	CAPAIAN (Lokasi)	
	TW I	s.d TW IV
Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNB(P(Lokasi)	-	17

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Analisis terhadap tingkat keberhasilan maupun kegagalan kegiatan pada tahap ini belum dapat dilakukan secara komprehensif, mengingat pelaksanaan kegiatan masih berlangsung dan proses penyampaian pelaporan dilakukan secara berkala dalam siklus tahunan. Dengan demikian, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta efektivitas solusi atau tindak lanjut yang diterapkan masih memerlukan proses pemantauan dan evaluasi lebih lanjut hingga seluruh rangkaian kegiatan dan tahapan pelaporan selesai dilaksanakan.

E. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi

Kegiatan pendukung ini masih dalam proses pelaksanaan dan merupakan bagian dari kegiatan yang bersifat berkelanjutan dengan mekanisme penyampaian pelaporan secara tahunan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan masih terus dilakukan melalui koordinasi, monitoring, pengumpulan data, serta penyusunan dan pengelolaan dokumen pendukung guna memastikan seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan

F. Rencana Aksi

Rencana aksi dilakukan melalui monitoring berkala, koordinasi pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data dukung, serta evaluasi capaian guna memastikan target tahunan dapat tercapai pada akhir periode pelaporan

IK 6. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)

Indikator yang menunjukkan proporsi rekomendasi kebijakan berupa insentif dan disinsentif yang diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut, berdasarkan 2 hasil evaluasi terhadap Penilaian Pelaksanaan KKPRL, Laporan Tahunan KKPRL, dan hasil penanganan aduan/sengketa. Berikut merupakan formula perhitungan yang digunakan dalam menentukan Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%) adalah sebagai berikut:

$$R (\%) = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan :

- R : Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif
- a : Jumlah subjek hukum yang diberikan rekomendasi insentif dan disinsentif dihitung sesuai jumlah subjek hukum penerima rekomendasi penghargaan ditambah jumlah subjek hukum penerima rekomendasi disinsentif sebagai tindak lanjut hasil penilaian pelaksanaan KKPRL, penilaian laporan tahunan KKPRL, dan hasil penanganan aduan/sengketa
- b : Jumlah subjek hukum obyek Penilaian Pelaksanaan KKPRL dihitung sesuai jumlah subjek hukum yang masuk dalam Rencana Aksi Penilaian Pelaksanaan KKPRL Direktorat Pengendalian pada tahun tersebut.

A. Capaian Indikator Triwulan I 2026

Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%) pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%) pada Triwulan I Tahun 2026 IK 6

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
1.	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut	6.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)	60	-

B. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025

Tabel 21 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025 IK 6

SP - 1	Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut					
IKU - 06	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)					
Realisasi TW I Tahun 2026	Tahun 2026				PK	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya	Target PK 2026	% Capaian
	-	-	-	-	60	-

C. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target tahunan Berjalan

Tabel 22 Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target tahunan Berjalan IK 6

INDIKATOR	CAPAIAN (%)	
	TW I	s.d TW IV
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)	-	60

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Analisis terhadap tingkat keberhasilan maupun kegagalan kegiatan pada tahap ini belum dapat dilakukan secara komprehensif, mengingat pelaksanaan kegiatan masih berlangsung dan proses penyampaian pelaporan dilakukan secara berkala dalam siklus tahunan. Dengan demikian, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta efektivitas solusi atau tindak lanjut yang diterapkan masih memerlukan proses pemantauan dan evaluasi lebih lanjut hingga seluruh rangkaian kegiatan dan tahapan pelaporan selesai dilaksanakan.

E. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi

Kegiatan pendukung ini masih dalam proses pelaksanaan dan merupakan bagian dari kegiatan yang bersifat berkelanjutan dengan mekanisme penyampaian pelaporan secara tahunan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan masih terus dilakukan melalui koordinasi, monitoring, pengumpulan data, serta penyusunan dan pengelolaan dokumen pendukung guna memastikan seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan

F. Rencana Aksi

Rencana aksi dilakukan melalui monitoring berkala, koordinasi pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data dukung, serta evaluasi capaian guna memastikan target tahunan dapat tercapai pada akhir periode pelaporan

IK 7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan waktu pengukuran. Berikut merupakan formula perhitungan yang digunakan dalam menentukan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah diberikan kepada unit kerja}} \times 100\%$$

A. Capaian Indikator 2026

Capaian Indikator Kinerja (IK) pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 100%, melampaui target sebesar 81%. Hal tersebut berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP Nomor 265/DJPRL.6/TU.140/IV/2026 tanggal 16 April 2026 perihal *Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP”*.

Tabel 23 Target dan Realisasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut TW I Tahun 2026 IK 7

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)	81%	81%

B. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025

Perbandingan capaian kinerja periode tahun 2025 dengan periode tahun 2026. Capaian kinerja tahun 2026 dibandingkan dengan capaian tahun 2025 naik 1% dari 80% menjadi 81%.

Tabel 24 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025 IK 7

SP - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut					
IKU - 07	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)					
Realisasi TW I Tahun 2026	Tahun 2026				PK	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya	Target PK 2026	% Capaian
	81	81	100	1	81	100

C. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 25 Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun Berjalan IK 7

INDIKATOR	CAPAIAN (%)	
	TW I	s.d TW IV
Persentase penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut (%)	81	81

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Capaian indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL)” pada Tahun 2026 mencapai 100%, melampaui target sebesar 81%. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen seluruh jajaran Direktorat PPRL. Selanjutnya, tidak terdapat kendala khusus dalam pelaksanaan indikator kinerja ini. Untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut diperlukan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi tindak lanjut

E. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi

1. Faktor pendukung indikator kinerja ini adalah adanya komitmen unit kerja dalam pencapaian target dengan capaian sebesar 100%

2. Dalam pencapaian target indikator kinerja ini tidak terdapat faktor penghambat maupun kendala yang dihadapi
3. Tidak terdapat solusi, karena pencapaian indikator kinerja ini tidak terdapat rekomendasi pada Triwulan I Tahun 2026.

F. Rencana Aksi

Monitoring indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dengan memanfaatkan Layanan Tindak Lanjut Online pada Inspektorat Jenderal KKP melalui Aplikasi SIDAK.

IK 8. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Nilai)

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP Unit Eselon II dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II di Direktorat Perencanaan Ruang Perairan. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Perencanaan Ruang Perairan dan data capaian dirilis melalui surat dari Sekretaris Ditjen PRL. Kategori nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan yaitu:

Tabel 26 Kategori nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

KATEGORI	NILAI	PREDIKAT
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50 – 60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

A. Capaian Indikator 2026

Capaian Indikator Kinerja (IK) pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 100%, melampaui target sebesar 81%. Hal tersebut berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP Nomor 265/DJPRL.6/TU.140/IV/2026 tanggal 16 April 2026 perihal *Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP”*.

Tabel 27 Target dan Realisasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut TW I Tahun 2026 IK 8

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat	8.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	70%	-

	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut				
--	-------------------------------------	--	--	--	--

B. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025

Perbandingan capaian kinerja periode tahun 2025 dengan periode tahun 2026. Capaian kinerja tahun 2026 dibandingkan dengan capaian tahun 2025 naik 1% dari 80% menjadi 81%.

Tabel 28 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025 IK 8

SP - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut					
IKU - 08	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Nilai)					
Realisasi TW I Tahun 2026	Tahun 2026				PK	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya	Target PK 2026	% Capaian
-	-	-	-	-	70	-

C. Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 29 Perbandingan Capaian Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Target Tahun Berjalan IK 8

INDIKATOR	CAPAIAN (Nilai)	
	TW I	s.d TW IV
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Nilai)	-	70

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Analisis terhadap tingkat keberhasilan maupun kegagalan kegiatan pada tahap ini belum dapat dilakukan secara komprehensif, mengingat pelaksanaan kegiatan masih berlangsung dan proses penyampaian pelaporan dilakukan secara berkala dalam siklus tahunan. Dengan demikian, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta efektivitas solusi atau tindak lanjut yang diterapkan masih memerlukan proses pemantauan dan evaluasi lebih lanjut hingga seluruh rangkaian kegiatan dan tahapan pelaporan selesai dilaksanakan.

E. Program Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Kegiatan pendukung ini masih dalam proses pelaksanaan dan merupakan bagian dari kegiatan yang bersifat berkelanjutan dengan mekanisme penyampaian pelaporan secara tahunan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan masih terus dilakukan melalui koordinasi, monitoring, pengumpulan data, serta penyusunan dan pengelolaan dokumen pendukung guna memastikan seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.

F. Rencana Aksi

Rencana aksi dilakukan melalui monitoring berkala, koordinasi pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data dukung, serta evaluasi capaian guna memastikan target tahunan dapat tercapai pada akhir periode pelaporan.

IK 9. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen)

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL dan Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun. Formula perhitungan yang digunakan dalam Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen) yaitu dengan cara Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun.

A. Capaian IK tahun 2026

Capaian IK ini pada Tahun 2026 adalah dokumen dengan target triwulanan IV dokumen. Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2025 Direktorat PPRL telah disampaikan melalui surat Nomor B.14/DJPRL.6/TU.330/I/2026 tanggal 08 Januari 2026 Laporan SPIP Periode Triwulan IV Tahun 2025 Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

Tabel 30 Target dan Realisasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut TW I Tahun 2026 IK 9

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	9.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen

B. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025

Perbandingan capaian kinerja periode tahun 2025 dengan periode tahun 2026. Capaian kinerja tahun 2026 dibandingkan dengan capaian tahun 2025 sama dikarenakan targetnya berupa dokumen.

Tabel 31 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025 IK 9

SP - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut					
IKU - 09	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen)					
Realisasi TW I Tahun 2026	Tahun 2026				PK	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya	Target PK 2026	% Capaian
1	1	1	100	-	4	25

C. Perbandingan Realisasi Kinerja TW Berjalan dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 32 Perbandingan Realisasi Kinerja TW Berjalan dengan Target Tahun Berjalan IK 9

INDIKATOR	CAPAIAN (Dokumen)	
	TW I	s.d TW IV
Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen)	1	4

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut tahun 2025 di dukung adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk menyampaikan data dan informasi yang diperlukan sebagai data dukung dalam pencapaian kinerja. Sementara itu, dalam pelaksanaan indikator kinerja ini tidak ditemukan kendala khusus dalam pelaksanaan indikator kinerja ini. Guna mempertahankan capaian indikator kinerja ini dilakukan dengan mempertahankan koordinasi dan monitoring rutin guna memastikan capaian kinerja ini tetap optimal dan berkelanjutan

E. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi

1. Faktor pendukung indikator kinerja ini adalah adanya komitmen unit kerja dalam pencapaian target dengan capaian sebesar 100%
2. Dalam pencapaian target indikator kinerja ini tidak terdapat faktor penghambat maupun kendala yang dihadapi
3. Tidak terdapat solusi, karena pencapaian indikator kinerja ini tidak terdapat rekomendasi pada Triwulan I Tahun 2026.

F. Rencana Aksi

Rencana aksi Tahun 2026 untuk indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, yakni mengikuti kegiatan terkait pengendalian intern/manajemen risiko dan penyusunan laporan SPIP Tahun 2026.

IK 10. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Berikut merupakan formula perhitungan yang digunakan dalam menentukan Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 IP &= \sum_{i=1}^4 IP_i \\
 &= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4 \\
 IP_1 &= W_{1j} * R_{1j} \\
 IP_2 &= W_{2k} * R_{2k} \\
 IP_3 &= W_{3l} * R_{3l} \\
 IP_4 &= W_{4m} * R_{4m}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

IP	: Indeks Profesionalisme
IP_i	: Indeks Profesionalisme ke-i
IP₁	: Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
IP₂	: Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
IP₃	: Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
IP₄	: Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

- $W_{1j} * R_{1j}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j
- $W_{2k} * R_{2k}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-k
- $W_{3l} * R_{3l}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-l
- $W_{4m} * R_{4m}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-m

A. Capaian IK tahun 2026

Capaian IK ini pada Tahun 2026 adalah dokumen dengan target triwulanan IV dokumen. Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2025 Direktorat PPRL telah disampaikan melalui surat Nomor B.14/DJPRL.6/TU.330/I/2026 tanggal 08 Januari 2026 Laporan SPIP Periode Triwulan IV Tahun 2025 Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

Tabel 33 Target dan Realisasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut TW I Tahun 2026 IK 10

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)	81 Indeks	-

B. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025

Perbandingan capaian kinerja periode tahun 2025 dengan periode tahun 2026. Capaian kinerja tahun 2026 dibandingkan dengan capaian tahun 2025 sama dikarenakan targetnya berupa dokumen.

Tabel 34 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025 IK 10

SP - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut					
IKU - 10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)					
Realisasi TW I Tahun 2026	Tahun 2026				PK	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya	Target PK 2026	% Capaian
-	-	-	-	-	81	-

C. Perbandingan Realisasi Kinerja TW Berjalan dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 35 Perbandingan Realisasi Kinerja TW Berjalan dengan Target Tahun Berjalan IK 10

INDIKATOR	CAPAIAN (Indeks)	
	TW I	s.d TW IV
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)	-	81

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Analisis terhadap tingkat keberhasilan maupun kegagalan kegiatan pada tahap ini belum dapat dilakukan secara komprehensif, mengingat pelaksanaan kegiatan masih berlangsung dan

proses penyampaian pelaporan dilakukan secara berkala dalam siklus semesteran. Dengan demikian, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta efektivitas solusi atau tindak lanjut yang diterapkan masih memerlukan proses pemantauan dan evaluasi lebih lanjut hingga seluruh rangkaian kegiatan dan tahapan pelaporan selesai dilaksanakan.

E. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi

Kegiatan pendukung ini masih dalam proses pelaksanaan dan merupakan bagian dari kegiatan yang bersifat berkelanjutan dengan mekanisme penyampaian pelaporan secara semesteran. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan masih terus dilakukan melalui koordinasi, monitoring, pengumpulan data, serta penyusunan dan pengelolaan dokumen pendukung guna memastikan seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan

F. Rencana Aksi

Rencana aksi dilakukan melalui monitoring berkala, koordinasi pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data dukung, serta evaluasi capaian guna memastikan target semesteran dapat tercapai pada akhir periode pelaporan

IK 11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon II diperoleh dari nilai unit pengolah.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - a. penciptaan arsip (25%)
 - b. penggunaan arsip (25%)
 - c. pemeliharaan arsip (25%)
 - d. penyusutan arsip (25%)
2. Sumber daya kearsipan (bobot 50%)
 - a. sumber daya manusia kearsipan (50%)
 - b. prasarana dan sarana (50%).

Kategori Nilai:

Tabel 36 Kategori nilai dalam pengawasan keasipan internal

NILAI	KATEGORI
>90 – 100	Sangat Baik
>75 – 90	Baik
>60 – 75	Cukup
≤60	Kurang

A. Capaian IK tahun 2026

Capaian IK ini pada Tahun 2026 adalah dokumen dengan target triwulanan IV dokumen. Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2025 Direktorat PPRL telah disampaikan melalui surat Nomor B.14/DJPRL.6/TU.330/I/2026 tanggal 08 Januari 2026 Laporan SPIP Periode Triwulan IV Tahun 2025 Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

Tabel 37 Target dan Realisasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut TW I Tahun 2026 IK 11

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	11.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)	75%	-

B. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025

Perbandingan capaian kinerja periode tahun 2025 dengan periode tahun 2026. Capaian kinerja tahun 2026 dibandingkan dengan capaian tahun 2025 sama dikarenakan targetnya berupa dokumen.

Tabel 38 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2026 dengan Tahun 2025 IK 11

SP - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut					
IKU - 11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)					
Realisasi TW I Tahun 2026	Tahun 2026				PK	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya	Target PK 2026	% Capaian
-	-	-	-	-	75	-

C. Perbandingan Realisasi Kinerja TW Berjalan dengan Target Tahun Berjalan

Tabel 39 Perbandingan Realisasi Kinerja TW Berjalan dengan Target Tahun Berjalan IK 11

INDIKATOR	CAPAIAN (%)	
	TW I	s.d TW IV
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)	-	75

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Analisis terhadap tingkat keberhasilan maupun kegagalan kegiatan pada tahap ini belum dapat dilakukan secara komprehensif, mengingat pelaksanaan kegiatan masih berlangsung dan proses penyampaian pelaporan dilakukan secara berkala dalam siklus tahunan. Dengan demikian, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta efektivitas solusi atau tindak lanjut yang diterapkan masih memerlukan proses pemantauan dan evaluasi lebih lanjut hingga seluruh rangkaian kegiatan dan tahapan pelaporan selesai dilaksanakan.

E. Faktor Penghambat/Pendukung dan Solusi

Kegiatan pendukung ini masih dalam proses pelaksanaan dan merupakan bagian dari kegiatan yang bersifat berkelanjutan dengan mekanisme penyampaian pelaporan secara tahunan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan masih terus dilakukan melalui koordinasi, monitoring, pengumpulan data, serta penyusunan dan pengelolaan dokumen pendukung guna memastikan seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan

F. Rencana Aksi

Rencana aksi dilakukan melalui monitoring berkala, koordinasi pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data dukung, serta evaluasi capaian guna memastikan target tahunan dapat tercapai pada akhir periode pelaporan

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2026 dengan total pagu anggaran sebesar Rp 9.508.597.000,00 dan pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp 3.485.498.000,00 dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) dan PHLN. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2026 realiasi mencapai Rp 591.290.941 atau 16,96 % dari total pagu efektif, pada table berikut :

Tabel 40 Akuntabilitas Keuangan TW I Tahun 2026

No	Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
Total Anggaran Dit. Pengendalian		9.508.597.000	3.485.498.000	591.290.941	2.808.437.059	16,96
1	Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang (%)	1.200.000.000	489.993.000	38.881.572	451.111.428	7,94
2	Persentase KKPRL yang Dipantau dan Dievaluasi (%)	1.000.000.000	571.246.000	231.645.716	329.600.284	40,55
3	Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPRL (%)	600.000.000	83.331.000	0	83.331.000	0
4	Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi)	1.000.000.000	416.780.000	71.810.400	344.969.000	17,23
5	Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBPN (Lokasi)	1.600.000.000	689.589.000	63.555.000	626.034.000	9,22
6	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)	600.000.000	235.650.000	10.423.253	225.226.747	4,42

7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)					
8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Nilai)					
9	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut(Dokumen)	1.000.000.000	467.756.000	13.296.500	454.459.500	2,8
10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)					
11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)					

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Pengendalian Penataan Ruang Laut Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Setditjen PRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Pengendalian PRL Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif.

Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PRL terdapat 11 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Pengendalian PRL pada Triwulan I Tahun

Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%) pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 100%, yaitu sebesar 81% sesuai dengan target triwulan yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja (IK) Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen) pada TW I mencapai 100% yaitu sebanyak 1 dokumen sesuai dengan target triwulan yang telah ditetapkan dan telah tercapai sebesar 25% dari target tahunan yang telah ditetapkan.

Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Dit. Pengendalian tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran DJPRL. Pagu anggaran Dit. Pengendalian Tahun 2026 sebesar Rp 9.508.597.000,00 dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) dan PHLN, dan pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp3.485.498.000,00 realisasi anggaran di lingkup Dit. Pengendalian PRL sampai dengan akhir periode Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp 591.290.941 atau 16,96 % dari total pagu anggaran efektif. Kendala dalam pelaksanaan kinerja periode Triwulan I Tahun 2026 adanya revisi efisiensi anggaran yang dapat beresiko pada penurunan capaian jika tidak dikelola dengan baik

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan dalam rangka mencapai target potensi PNPB, meningkatkan kinerja organisasi, dan mengantisipasi faktor hambatan atau masalah yang dihadapi atau mungkin akan dihadapi pada periode berikutnya.

4.3 Tindak Lanjut

Rekomendasi tindak lanjut dari rekomendasi laporan Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Tindak Lanjut Rekomendasi

REKOMENDASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
Penguatan Verifikasi dan Validasi Lapangan	Perlu dilakukan verifikasi dan validasi lapangan secara bertahap dan terencana untuk memastikan keakuratan data hasil identifikasi berbasis penginderaan jauh, termasuk penetapan subjek hukum, status kegiatan, dan kepastian luasan pemanfaatan ruang laut	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di Kabupaten Kepulauan Seribu	https://drive.google.com/file/d/1lhZut0ckSvWviJPXsVdeqb7hhQziM8Zb/view
Sinkronisasi dan Integrasi Data Antar-Instansi	Diperlukan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, UPT teknis, dan instansi sektoral terkait guna memastikan sinkronisasi, konsistensi, dan interoperabilitas data pemanfaatan ruang laut sebagai satu basis data yang terstandar	Telah dilakukan koordinasi dengan BPRL Makassar, DKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Selatan, Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan terkait dengan Perwujudan RZ KAW Teluk Bone	https://drive.google.com/drive/folders/1v-nlYsZCG2HmQFxfkgorw1OoCrIzKgHZa

Pemanfaatan Data untuk Penguatan Pengendalian dan Kepatuhan	Data hasil identifikasi agar dimanfaatkan sebagai dasar dalam pembinaan kepatuhan perizinan, evaluasi perwujudan rencana zonasi, serta dukungan penegakan pengendalian pemanfaatan ruang laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting Provinsi Kalimantan Selatan	https://drive.google.com/file/d/1bsE4OyL9DgPR-L8AuhAUET3udhLs5JxU/view
---	---	---	---